

ANALISIS KEGAGALAN ORGANIZATION FOR PROHIBITED OF CHEMICAL WEAPON (OPCW) SEBAGAI ORGANISASI PERLUCUTAN SENJATA PADA KONFLIK SURIAH

ANALYSIS OF ORGANIZATION FOR PROHIBITED OF CHEMICAL WEAPON (OPCW) FAILURE AS DISARMAMENT ORGANIZATION ON SYRIAN CONFLICT

Denik Iswardani Witarti dan Anggun Puspitasari

Universitas Budi Luhur

(denik.iswardani@budiluhur.ac.id dan anggun.puspitasari@budiluhur.ac.id)

Abstrak – Tulisan ini menganalisis tentang kegagalan *Organization for Prohibited of Chemical Weapon* (OPCW) dalam menangani upaya perlucutan senjata kimia di Suriah. Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah terhadap warga negaranya sendiri menjadi tantangan OPCW dalam menjalankan perannya untuk melarang penggunaan dan pengembangan senjata kimia di seluruh dunia. OPCW sendiri yang terbentuk pada tahun 1997 merupakan implementasi dari *Chemical Weapon Convention* (CWC) 1993. Permasalahan utama dari kajian ini yaitu faktor-faktor kegagalan OPCW dalam upaya pelarangan penggunaan dan pengembangan senjata kimia pada konflik Suriah. Hasil kajian menunjukkan upaya pelucutan senjata kimia di Suriah oleh OPCW dilakukan dengan mengirim dan menghancurkan senjata kimia milik pemerintah mengalami kegagalan. Meski OPCW telah mengklaim Suriah sudah terbebas dari senjata kimia namun ternyata masih ditemui penggunaan senjata kimia oleh kelompok teroris ISIS dan kelompok oposisi yang tidak diakui pemerintah. Kesimpulannya, peran OPCW menurut konsep perlucutan senjata dan organisasi internasional masih belum sepenuhnya berhasil. OPCW hanya mampu mendeteksi penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah. Organisasi ini tidak memiliki kewenangan dalam menanggapi masalah penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh aktor non-state.

Kata Kunci : senjata kimia, konflik Suriah, OPCW, pelucutan senjata

Abstract – This paper analyzes the failure of the *Organization for Prohibited of Chemical Weapon* (OPCW) in handling chemical weapon disarmament in Syria. The use of chemical weapons by the Syrian government against its own citizens poses a challenge for OPCW in its role to ban the use and development of chemical weapons worldwide. OPCW itself formed in 1997 is an implementation of *Chemical Weapon Convention* (CWC) in 1993. The main problem of this study is OPCW failure factors to ban the use and development of chemical weapons in Syrian conflict. The study shows that the chemical weapon disarmament efforts in Syria by the OPCW by sending and destroying government-owned chemical weapons has failed. Although OPCW has claimed Syria has been freed from chemical weapons but it still encountered the use of chemical weapons by ISIS terrorist groups and unofficial opposition groups. In conclusion, the role of the OPCW according to the concept of disarmament and the international organization is still not fully successful. OPCW was only able to detect the use of chemical weapons committed by the Syrian government. This organization has no authority in overcoming the problem of the misused chemical weapons that committed by non-state actors.

Keywords: chemical weapons, Syrian conflict, OPCW, disarmament

Pendahuluan

Salah satu senjata yang paling ditakuti yaitu senjata pemusnah massal atau *weapons of mass destruction* (WMD), terdiri dari nuklir, biologi dan kimia (Nubika), saat ini menjadi isu yang semakin mengemuka baik diluar maupun didalam negeri terutama setelah munculnya berbagai teror biologi dan kimia. Sumber ancaman dari nuklir telah meluas hingga ke tingkat zat radioaktif disertai dengan kemajuan teknologi di bidang kimia khususnya dengan ditemukannya bahan-bahan peledak baru. Oleh karena itu ancaman Nubika yang semula dikenal dengan istilah *Nuclear, Biological, Chemical* (NBC) saat ini telah berkembang menjadi *Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear* (CBRN).¹Salah satu negara yang memiliki senjata kimia yaitu negara Suriah. Secara khusus, serangkaian bencana kekalahan militer Suriah oleh Israel pada tahun 1967, 1973, dan 1982, diikuti oleh melemahnya persatuan Arab melawan Israel setelah perjanjian damai 1979 Mesir-Israel dan dugaan kepemilikan senjata nuklir di Israel, memberikan dorongan bagi Suriah untuk menggunakan strategi *deterrence* terhadap senjata konvensional dan nuklir Israel.²

Seperti senjata nuklir dan senjata biologi, senjata kimia diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal yang

¹ Tim Sweijs and Jaakko Kooroshy, *The Future of CBRN*, (Hague: The Hague Centre for Strategic Studies, 2010), hlm. 9.

² M. Zuhair Diab, "Syria's Chemical and Biological Weapons: Assessing Capabilities and Motivations," *The Nonproliferation Review* 5, 1997, hlm. 107.

memiliki kapasitas mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar dalam satu serangan. *Organization of Prohibited Chemical Weapon* (OPCW) yang berdiri tahun 1997 merupakan entitas terakhir dalam tiga perjanjian global yang mengatur tiga senjata pemusnah massal/*Weapon Mass Destruction* (WMD).³Berlakunya OPCW mampu memaksa negara untuk tidak memiliki dan mengembangkan senjata kimia, salah satunya yaitu Suriah yang baru bergabung dengan OPCW pada tahun 2013, setelah terjadinya penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah dalam konflik.⁴

Tim OPCW mulai melakukan pekerjaan setelah adanya sebuah terobosan resolusi dari Dewan Keamanan PBB pada bulan September 2013. Tim investigasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memastikan adanya penggunaan senjata kimia dalam serangan roket di wilayah Ghouta, pinggir Kota Damaskus, Suriah pada 21 Agustus 2013. Amerika Serikat mengklaim serangan tersebut menewaskan sekitar 1.400 orang, dan mempersalahkan pasukan pemerintah Suriah sebagai pengguna senjata kimia dalam serangan tersebut. Di lain pihak, Rusia dan pemerintah Suriah menegaskan bahwa pihak pemberontak yang harus bertanggungjawab atas serangan senjata kimia tersebut.⁵

³ Ramesh Takur dan Ere Haru, *The Chemical Weapons Convention: Implementation, Challenges and Opportunities*, (Hongkong: United Nations University Press, 2006), hlm. 1.

⁴ "Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – Facts", https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2013/opcw-facts.html, diakses pada 10 Juli 2016.

⁵, "Government Assessment of the Syrian

Resolusi yang disahkan DK-PBB tersebut memiliki dua tuntutan. Pertama, Suriah harus menyerahkan semua cadangan senjata kimia. Kedua, pakar senjata kimia internasional diberikan akses yang leluasa untuk memastikan hal itu dilakukan. Batas waktu penyerahan senjata kimia adalah pertengahan 2014.⁶

Namun, ada beberapa kesalahan pada mekanisme pelarangan penggunaan dan pengembangan senjata kimia oleh OPCW yang meninggalkan masalah. Terdapat adanya beberapa pelaku *non-state* yang menggunakan senjata kimia yaitu ISIS dan oposisi Suriah. ISIS dilaporkan menggunakan senjata kimia dalam konflik dengan pemberontak Suriah pada 2015.⁷ Padahal pada program penghapusan senjata kimia Suriah yang dicapai pada 20 Agustus 2014 berhasil dengan lancar dengan selesainya pengiriman 1.300 ton bahan senjata kimia atau 100% bahan senjata kimia melalui kapal AS kapal Cape Ray ke luar wilayah Suriah menuju Eropa dan Amerika Serikat.⁸ Dari sekian banyaknya rezim senjata internasional, OPCW yang dianggap

Government's Use of Chemical Weapons on August 21 2013", 30 Agustus 2013, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21>, diakses pada 1 oktober 2017.

⁶ *Ibid.*

⁷ Tom Bowman, U.S. Hopes ISIS Prisoner Will Lead Americans To Chemical Weapons, ⁹ Maret 2016, <http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/03/09/469842162/u-s-hopes-isis-prisoner-will-lead-americans-to-chemical-weapons>, diakses pada 5 oktober 2017.

⁸ "About OPCW-UN Joint Mission: Background", <http://opcw.unmissions.org/AboutOPCWUNJointMission/Background.aspx>, diakses pada 5 oktober 2017.

mampu memusnahkan senjata kimia di dunia. Berdasarkan keberhasilannya tersebut, OPCW mendapat Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2013 atas upaya untuk membebaskan dunia dari senjata mematikan.⁹ Namun dalam perkembangannya justru terdapat aktor *non-state* yang menggunakan senjata kimia seperti kelompok teroris ISIS.¹⁰ Sebagai organisasi perlucutan senjata kimia, OPCW juga harus menangani hal tersebut. Masih digunakannya senjata kimia menjadi indikasi kegagalan OPCW sebagai sebuah organisasi perlucutan senjata. Oleh karena itu pengkajian terhadap faktor-faktor dan indikator kegagalan OPCW merupakan hal yang esensial untuk dijadikan suatu tolak ukur efektivitas sebuah rezim dan organisasi perlucutan senjata.

OPCW sebagai Organisasi Perlucutan Senjata Kimia

Disarmament (pelucutan senjata) merupakan pernyataan sah untuk pemusnahan semua kepemilikan, pengembangan, dan penggunaan senjata tertentu demi kepentingan damai dan perang. Menghendaki adanya pemusnahan dan perlucutan persenjataan secara global, dan pembubaran seluruh angkatan perang negara merupakan pengertian umum dari *disarmament*. Charles P. Schleicher

⁹ "Nobel Peace Prize 2013 received by OPCW Director-General: Working Together for a World Free of Chemical Weapons, and Beyond", 10 Desember 2013, <https://www.opcw.org/news/article/nobel-peace-prize-2013-received-by-opcw-director-general-working-together-for-a-world-free-of-ch/>, diakses pada 12 oktober 2017.

¹⁰ Tom Bowman, *op.cit.*

mengatakan bahwa *Disarmament* “means of reducing or eliminating material and human instrumentalities for the exercise of physical violence”¹¹. Dengan kata lain *disarmament* berarti mengurangi atau menghilangkan bahan dan perangkat manusia yang digunakan untuk tindak kekerasan (senjata).

Menurut UNIDIR (*United Nations Disarmament Institute for Research*) “perlucutan senjata merupakan aksi kemanusiaan, diwujudkan dengan bentuk negosiasi multilateral”. Menurut mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Anan, perlucutan senjata adalah konsep hubungan kekuasaan, ruang geografis, keuntungan ekonomi dan proyeksi ideologis untuk memahami ancaman yang berbeda, sekaligus menentukan level senjata dan tipe senjata, pasukan yang dimobilisasi diantara bangsa-bangsa dalam komunitas internasional.¹² Secara tradisional, perlucutan senjata adalah bagian dari proses tiga bagian: *disarmament* (perlucutan senjata), *demobilization* (demobilisasi), dan *reintegration* (reintegrasi). Biasanya, PBB atau pemerintah tuan rumah mengumpulkan senjata (perlucutan senjata), membubarkan kelompok bersenjata tidak resmi (demobilisasi), dan paket asimilasi mantan tentara ke masyarakat melalui pelatihan dan dukungan pekerjaan (reintegrasi).¹³

¹¹ Peu Ghosh, *International Relations*, (Delhi : PHI Learning Private Limited, 2013), hlm. 296.

¹² Henry Ekpe Ushie, (2008), *Disarmament In Thirdworld Countries: Nigeria In Perspective*, (Abuja: Department of Political Science and International Relations University of Abuja), hlm. 2. c

¹³ Cecily Brewer, *Disarmament in South Sudan*,

Pertanyaan yang lebih besar untuk implementasi perlucutan senjata adalah apa yang mendefinisikan pelucutan senjata itu berhasil? PBB dan aktor-aktor lain sering melaporkan jumlah senjata dikumpulkan sebagai ukuran keberhasilan. Pertanyaan ini kemudian merujuk kembali ke pertanyaan awal: Apa tujuan perlucutan senjata? PBB telah mengatakan ini tentang tujuan DDR (*Disarmament, Demobilization, Reintegration*) yaitu meningkatkan keamanan, mengurangi jumlah senjata yang beredar tetap menjadi tujuan utama dari DDR; memberikan kontribusi untuk keamanan dan stabilitas dalam situasi pasca konflik sehingga pemulihan dan pembangunan dapat dimulai sebagai bagian dari tujuan proses DDR; menjaga kestabilan keamanan melalui pengelolaan kombatan bersenjata dan meningkatkan keamanan manusia sebagai tujuan utama dari DDR. “Jangan lakukan hal yang membahayakan” adalah prinsip standar yang semua intervensi DDR harus dievaluasi setiap waktu.¹⁴ Menurut *United Nation Disarmament, Demobilize, and Reintegration (UNDDR)*, konsep *disarmament* merupakan koleksi, dokumentasi, kendali dan pembuangan senjata kecil, amunisi, bahan peledak dan senjata ringan dan berat milik kombatan dan sering juga penduduk sipil termasuk mencakup pengembangan dalam skala sekecil apapun.¹⁵

(Washington: Center for Complex Operation 2010), hlm. 11.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁵ “What is DDR?”, http://www.unDDR.org/what-is-ddr/introduction_1.aspx. Diakses tanggal 1 Oktober 2017

Untuk lebih singkat, indikator keberhasilan perlucutan senjata dapat dilihat dalam skema berikut:

DISARMAMENT	Disarmament for combatans	Status: Clear
	Disarmament for non combatans	Status: Clear
	Collect and destruct weapons (abolish)	Status: Clear
DEMOBILIZATION	Weapon status verification	Status: Clear
	Armed group demobilization	Status: Clear
	Weapon development dismissal	Status: Clear
REINTEGRATION	Reintegration ex-combatans to society	Status: Clear
	Support group and supervision	Status: on progres to Clear

Sumber: H. Swift, *The Emergence of Intergovernmental Peace Organisations: An Overview*, Amicus Curiae, 2016(100), 2-5.

Dalam skema diatas, pada proses *disarmament* dan *demobilization*, semua komponen harus terselesaikan sampai statusnya berupa *clear*, yang akhirnya semua komponen persenjataan sudah terlucuti, serta segala bentuk aktor yang terlibat didalamnya sudah dimobilisasi dan dibubarkan. Dengan demikian segala upaya perlucutan senjata yang dilakukan oleh sebuah aktor, baik *state* maupun *non-state* harus memenuhi semua indikator dalam skema diatas.

Wacana persenjataan WMD (*Weapon of Mass Destruction*) telah menyebabkan pembentukan arsitektur perlucutan senjata global. CWC (*Chemical Weapon Convention*) atau KSK (Konvensi Senjata Kimia) yang merupakan bagian penting arsitektur ini. Setelah KSK ditandatangani di Paris pada tahun 1993, *Organization for the Prohibited of Chemical Weapon* (OPCW) didirikan pada

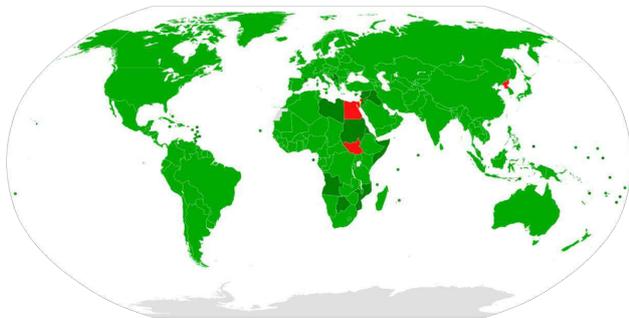
tahun 1997 untuk memantau pelaksanaan KSK. OPCW (*Organisation Prohibited of Chemical Weapon*) adalah organisasi internasional perlucutan senjata yang sepenuhnya independen dimana kegiatan organisasi ini murni berlandaskan pada KSK untuk menghilangkan kemungkinan dalam mengembangkan, memproduksi, menggunakan, penimbunan atau mentransfer senjata-senjata kimia.¹⁶ Visi OPCW adalah menuntut dunia yang bebas dari senjata kimia dan meningkatkan kerjasama dalam penggunaan senyawa kimia dengan tujuan damai. Tujuan utama organisasi adalah untuk memberikan kontribusi terhadap keamanan internasional dan stabilitas, perlucutan senjata umum dan total, dan pembangunan ekonomi global. Untuk membantu menghancurkan dan non-proliferasi senjata kimia, OPCW bergantung pada sekelompok pemeriksa internasional yang terlatih khusus dalam melaksanakan inspeksi situs militer dan industri.

Dalam rentang waktu hampir dua dekade hingga Oktober 2015, OPCW telah mendapatkan dukungan dari hampir semua negara anggota PBB berjumlah 192 negara (mencakup 98 persen dari populasi dunia) telah setuju untuk terikat oleh konvensi ini. Sementara satu negara telah menandatangani namun belum meratifikasi yaitu Israel. Kemudian tiga negara belum menandatangani maupun

¹⁶ "Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW", <http://www.denhaag.nl/en/residents/to/Organisation-for-the-Prohibition-of-Chemical-Weapons-OPCW.htm>, 9 Mei 2014, diakses pada 3 Agustus 2017.

meratifikasi yaitu Mesir, Korea Utara, dan Sudan Selatan.¹⁷ Negara-negara yang telah menandatangani, menyetujui, dan meratifikasi KSK selanjutnya akan disebut sebagai Negara Pihak.

Gambar 1. Negara Anggota OPCW



■ : menandatangani dan meratifikasi ■ : tidak menandatangani
 ■ : menyetujui

Sumber: <https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/>, diunduh pada 31 oktober 2017.

OPCW merupakan bagian penting dari sistem PBB yang menyediakan penelitian dan informasi tentang penggunaan dan potensi penggunaan senjata kimia, termasuk oleh organisasi teroris. Hal ini juga melihat pergerakan senyawa kimia yang bisa digunakan untuk dijadikan senjata global.¹⁸ PBB dapat meminta OPCW untuk melaksanakan ahli “tantangan inspeksi” untuk menjamin negara-pihak yang sudah menandatangani, meratifikasi dan menyetujui konvensi untuk memegang komitmen mereka untuk tidak mengembangkan, persediaan atau menggunakan senjata tersebut.

¹⁷ “Chemical Weapons Convention Signatories and States-Parties”, <https://www.armscontrol.org/factsheets/cwcsig>, Oktober 2015, diakses pada 20 Mei 2016.

¹⁸ Ajey Lele, “CWC’s First Decade”, *Journal on Chemical and Biological Weapons*, Sep-Des 2007, hlm. 9.

Dalam upaya memastikan bahwa KSK diimplementasikan secara efektif, Negara Pihak wajib menunjuk atau membentuk Otoritas Nasional. Badan ini mengawal pemeriksaan situs industri atau militer yang relevan oleh OPCW, menyampaikan deklarasi awal dan tahunan, membantu dan melindungi orang-orang Negara Pihak yang terancam atau menderita oleh serangan kimia dan mendorong penggunaan senyawa kimia untuk tujuan damai. Selain itu, Otoritas Nasional bertindak sebagai titik fokus dalam interaksi Negara Pihak dengan Negara Pihak lain dan Sekretariat Teknis OPCW. Sekretariat mendukung Negara Pihak dalam pelaksanaan nasional mereka dari KSK. Fokus dari pekerjaan ini adalah untuk memberikan saran dan bantuan kepada staf Otoritas Nasional, dalam rangka untuk membantu mereka meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka dalam memfasilitasi dan kemandirian implementasi nasional yang efektif. Sekretariat Teknis mengkoordinasi dan tuan rumah dalam pertemuan rutin dari Otoritas Nasional dari seluruh dunia.¹⁹

Sejak OPCW didirikan tahun 1997 dan bersifat pemaksaan hingga 31 Oktober 2015 sebanyak 65.720 metrik ton atau 90%, dari persediaan senjata kimia yang dinyatakan dunia sebanyak 72.525 metrik ton bahan kimia telah dibuktikan hancur. Sebanyak 4.970.000 atau 57,32%, dari 8.670.000 amunisi dan

¹⁹ “The Chemical Weapons Ban Facts and Figures”, <https://www.opcw.org/news-publications/publications/facts-and-figures/>, diakses pada 2 Juni 2016.

kontainer kimia yang diverifikasi oleh KSK telah dibuktikan hancur. OPCW telah mengembangkan basis data analitis internasional yang unik, *peer-review*, dan sertifikat yang berisi informasi di lebih dari 3.900 senyawa kimia senjata-terkait. Basis data ini sangat penting untuk kegiatan verifikasi di tempat tim inspeksi OPCW, dan juga tersedia untuk Negara Pihak. Tes Keahlian resmi dilakukan untuk memilih, sertifikasi, dan melatih laboratorium Negara Pihak untuk menganalisa sampel otentik senyawa kimia terkait senjata, 20 laboratorium telah ditunjuk.²⁰

Hasil dari upaya OPCW dalam melakukan pelarangan dan pencegahan dalam penggunaan senjata kimia masih terus berjalan. Enam Negara Pihak (Albania, India, Irak, Libya, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat) telah menyatakan senjata kimia yang harus dihancurkan sebanyak 8.670.000 komponen, termasuk yang mengandung amunisi dan kontainer, dan 72.525 metrik ton bahan kimia tergolong sangat beracun. Albania, India, Libya dan negara keempat telah menyelesaikan penghancuran senjata tersebut. Sebagai perbandingan, setetes kecil dari jenis agen saraf, tidak lebih besar dari kepala pin, dapat membunuh seorang manusia dewasa dalam beberapa menit. OPCW memverifikasi bahwa proses penghancuran tidak dapat diubah. Pada saat yang sama, Negara-negara Pihak dalam prosesnya untuk menghancurkan senjata kimia wajib menempatkan prioritas tertinggi pada keselamatan manusia

²⁰ *Ibid.*

dan perlindungan lingkungan.²¹ Namun, terlepas dari pencapaian tersebut, masih terdapat penggunaan senjata kimia di berbagai negara, khususnya negara yang sedang mengalami konflik.

Penggunaan Senjata Kimia pada Konflik di Suriah

Pada bulan Juli 2012, Suriah mengakui secara terbuka bahwa negara tersebut memiliki senjata kimia. Selama beberapa tahun sebelum pengumuman ini, agen intelijen Amerika Serikat menilai bahwa Suriah memiliki cadangan senjata kimia, termasuk gas mustard, agen blister, dan agen saraf seperti sarin dan VX. Suriah juga memiliki kemampuan untuk memasukkan agen ini dengan menggunakan bom udara, rudal balistik, dan roket artileri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Suriah, Jihad Makdissi menegaskan bahwa Suriah memang memiliki senjata kimia, yang tidak akan pernah digunakan terhadap rakyat Suriah, namun hanya terhadap “agresi eksternal”.²²

Pernyataan tidak akan digunakannya senjata kimia ini terhadap rakyat Suriah terbantahkan pada Desember 2012. Terdapat adanya penggunaan pertama senjata kimia dilaporkan. Tujuh orang diduga tewas di Homs oleh “gas beracun” yang digunakan oleh rezim Assad. Jangkauan termasuk laporan efek samping seperti mual, otot rileks,

²¹ *Ibid.*

²² “Use of chemical weapons in Syria would be ‘reprehensible’ – UN chief”, 23 Juli 2012, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42538#.V3LqFV4Ta9U>, diakses pada 20 Oktober 2017.

penglihatan kabur, dan kesulitan bernapas. Pasukan Assad menyerang kawasan yang dikuasai pemberontak al-Bayyada di kota Suriah barat dengan gas beracun yang mirip dengan sarin yang mematikan.²³ Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah terhadap warga negaranya sendiri merupakan salah satu pelanggaran terhadap ketentuan KSK dan OPCW.

Komisi Penyelidikan Independen Internasional PBB di Republik Arab Suriah menerbitkan laporan terbaru, yang mencakup periode 15 Januari-15 Mei tahun 2013. Paragraf 139-140 yang berbunyi: Tuduhan telah dikonfirmasi terkait dengan penggunaan senjata kimia oleh kedua belah pihak (dalam konflik di Suriah). Perhatian mayoritas mereka digunakan oleh pasukan pemerintah. Dalam empat serangan di Khan Al-Asal, Aleppo, 19 Maret 2013; Uteibah, Damaskus, 19 Maret 2013; lingkungan Sheikh Maqsood, Aleppo, 13 April 2013; dan Saraqib, Idlib, 29 April 2013, terdapat alasan yang kuat untuk percaya bahwa jumlah tertentu dari bahan kimia beracun telah digunakan. Insiden lain juga tetap diselidiki termasuk temuan konklusif, karena penggunaan senjata tidak dilakukan dalam jumlah yang besar, penyelidikan terhadap penggunaan senjata oleh pemerintah Suriah mungkin dicapai setelah dilakukannya pengujian sampel yang diambil langsung dari korban atau lokasi serangan dugaan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa Panel Ahli, yang

²³ Raffi Khatchadourian, "The Case of Agent 15: Did Syria Use a Nerve Agent?", 16 Januari 2013, <http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-case-of-agent-15-did-syria-use-a-nerve-agent>.

dipimpin oleh Profesor Sellström dan dirakit di bawah Mekanisme Sekretaris Jenderal untuk Investigasi Dugaan Penggunaan Senjata Kimia dan Biologi, diberikan akses penuh ke Suriah.²⁴

Pemerintah Amerika Serikat juga telah memantau potensi penggunaan senjata kimia di Suriah. Berawal dari penilaian yang dibuat oleh komunitas intelijen Amerika Serikat pada bulan April 2013. Presiden AS mengarahkan tim intelijen untuk mencari informasi kredibel untuk membangun penilaian dan menetapkan fakta-fakta dengan beberapa kemungkinan. Penolakan pemerintah Suriah untuk memberikan akses ke PBB dalam menyelidiki setiap dan semua tuduhan penggunaan senjata kimia telah menghambat penyelidikan yang komprehensif dan kredibel untuk dilakukan. Rezim Assad mengatakan bahwa permintaan untuk penyelidikan yang memberikan PBB akses langsung dan melakukan investigasi hanyalah strategi pengalihan. Dalam upaya mendorong penyelidikan PBB, Amerika Serikat juga telah bekerjasama dengan mitra dan sekutu serta individu di dalam wilayah Suriah, untuk pengadaan, berbagi, dan mengevaluasi informasi yang terkait dengan laporan dari penggunaan senjata kimia. Komunitas intelijen Amerika Serikat juga menilai bahwa rezim Assad telah menggunakan senjata kimia, termasuk sarin agen saraf, dalam skala kecil terhadap

²⁴ UN Human Rights Council, 23rd session, "Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic", advance unedited version, UN document A/HRC/23/58, 4 Juni 2013, hlm.21.

oposisi beberapa kali dalam Mei 2012-Mei 2013. Komunitas intelijen AS memiliki keyakinan tinggi bahwa penilaian yang diberikan oleh beberapa aliran informasi independen adalah akurat. Komunitas intelijen memperkirakan bahwa 100 sampai 150 orang telah meninggal akibat serangan senjata kimia yang terdeteksi di Suriah sampai Juni 2013.²⁵

Pada Agustus 2013 terjadi serangan senjata kimia di wilayah Damaskus. Pemerintah Amerika Serikat menilai dengan keyakinan tinggi bahwa pemerintah Suriah melakukan serangan senjata kimia di pinggiran kota Damaskus pada 21 Agustus 2013. Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa Rezim Assad menggunakan senjata kimia yang merusak agen saraf dalam serangan itu. Penilaian semua sumber tersebut didasarkan pada sebuah lembaga besar dan sumber-sumber independen yang menunjukkan bahwa serangan senjata kimia berlangsung di pinggiran kota Damaskus pada 21 Agustus 2013. Selain informasi intelijen AS, terdapat laporan dari tenaga medis internasional di Suriah, video, laporan saksi, ribuan laporan media sosial dari setidaknya 12 lokasi yang berbeda di daerah Damaskus, laporan wartawan, dan laporan dari lembaga swadaya masyarakat yang sangat kredibel. Sebuah penilaian awal pemerintah AS

²⁵ Office of Press Secretary, "Statement by Deputy National Security Advisor for Strategic Communications Ben Rhodes on Syrian Chemical Weapons Use", 13 Juni 2013, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statement-deputy-national-security-advisor-strategic-communications-ben->, diakses pada 29 Juni 2016.

menetapkan bahwa 1.429 orang tewas dalam serangan senjata kimia, termasuk setidaknya 426 anak-anak.²⁶

Kejadian ini mengakibatkan Suriah setuju untuk menempatkan senjata kimia di bawah kendali internasional untuk membongkar senjata kimia dan Amerika Serikat setuju untuk tidak melakukan serangan militer terhadap negara itu. Suriah juga setuju untuk menyambut diskusi dengan Rusia. Presiden Barack Obama, Presiden Perancis Francois Hollande, dan Perdana Menteri Inggris David Cameron membahas bagaimana melaksanakan rencana melalui Dewan Keamanan PBB. Perancis mulai menyusun resolusi berdasarkan usulan Rusia, tetapi dengan ketentuan yang memaksa berwenang jika Assad gagal untuk melaksanakan ketentuan resolusi.²⁷ Penggunaan senjata kimia sebagai senjata pemusnah massal yang dilarang penggunaannya telah diketahui oleh negara luar, membuat posisi pemerintah Suriah semakin terjepit untuk menerima secara sukarela untuk melakukan perlucutan senjata kimia oleh organisasi internasional khusus yang menangani senjata kimia.

Namun selain pemerintah Suriah, menurut Carla Del Ponte seorang

²⁶ Office of Press Secretary, "Government Assessment of the Syrian Government's Use of Chemical Weapons on August 21, 2013", 30 Agustus 2013, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21>.

²⁷ Yuta Kawashima, *Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity 2012-2015*, <http://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity> Mei 2015, diakses pada 15 Juni 2016.

peneliti HAM PBB independen telah mengumpulkan kesaksian dari korban perang sipil Suriah dan staf medis yang menunjukkan bahwa pasukan pemberontak telah menggunakan agen saraf yaitu gas sarin. Komisi penyelidikan PBB yang independen di Suriah belum melihat bukti dari pasukan pemerintah telah menggunakan senjata kimia, yang dilarang di bawah hukum internasional.²⁸ Selain itu, pasukan ISIS (*Islamic States of Iraq and Syria*) melakukan serangan langsung pada warga sipil secara terus menerus. ISIS juga dilaporkan telah melancarkan serangan kimia menggunakan agen klorin dan mustard. *Syrian American Medical Society* mengatakan bahwa stafnya melakukan perawatan kepada lebih dari 50 penduduk sipil dengan gejala yang menunjukkan paparan bahan kimia setelah pasukan ISIS menembak mortir dan artileri ke Marea, sebuah kota di Aleppo, pada tanggal 21 Agustus 2015.²⁹ ISIS merupakan salah satu aktor non-state yang semakin memperjelas bahwa konflik di wilayah Suriah ini merupakan konflik kontemporer. Dapat dikatakan, walaupun pemerintah Suriah telah setuju untuk melakukan perlucutan terhadap senjata kimia, namun peredaran senjata kimia di Suriah oleh tentara ISIS masih belum dapat dikendalikan.

²⁸ “UN’s Del Ponte says evidence Syria rebels ‘used sarin’, 6 Mei 2013, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22424188>, diakses pada 17 Juni 2016.

²⁹ “Syria 2015/2016”, <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/>, diakses pada 29 Juni 2016.

Analisis kegagalan OPCW di Suriah

OPCW tidak berdiam diri melihat adanya penggunaan senjata tersebut di konflik Suriah. Sebagai organisasi internasional yang memiliki kewajiban melucuti senjata kimia dunia, salah satu upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penggunaan senjata kimia di Suriah adalah dengan membentuk tim *ad hoc* yang dinamakan *OPCW Fact Finding Mission (FFM)* pada 29 April 2014. Sebagai hasil dari penyelidikan pertama, FFM mengeluarkan tiga laporan pada tahun 2014 yang menyimpulkan bahwa klorin telah digunakan dalam serangan terhadap tiga desa di Suriah utara. Direktur Jenderal OPCW Ahmet Uzumcu telah mengumumkan ke negara-negara pihak berupa tiga laporan yang disampaikan kepadanya oleh tim FFM. FFM telah bertugas untuk melihat ke dalam tiga bagian terpisah dari insiden di mana penggunaan bahan kimia beracun di Suriah telah dilaporkan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemerintah Republik Arab Suriah bahwa tentaranya telah mengalami korban dari penggunaan bahan kimia beracun, tim FFM melakukan tiga tim penyebaran ke Suriah. Tim ini telah mengeluarkan laporan sementara yang detail analisis dari insiden dilaporkan terjadi di Jobar pada 29 Agustus 2015. Berdasarkan bukti yang tersedia mengenai insiden ini, FFM tidak bisa percaya diri menentukan bahwa bahan kimia yang digunakan sebagai senjata.³⁰

³⁰ “Director-General circulates OPCW FFM Reports to States Parties”, 6 November 2015, <https://www.opcw.org/news/article/director-general-circulates-opcw-ffm-reports-to-states-parties/>,

Tim FFM kedua menyelidiki tuduhan penggunaan bahan kimia beracun pada periode Maret-Mei tahun 2015 dalam provinsi Idlib Suriah yang mengakibatkan kematian enam orang. Berdasarkan analisis informasi dan bukti yang tersedia untuk itu, FFM menyimpulkan bahwa dugaan insiden kemungkinan melibatkan penggunaan satu atau lebih bahan kimia beracun dan adanya kemungkinan mengandung unsur klorin sebagai senjata.³¹ OPCW FFM juga telah menyelidiki insiden ketiga yaitu pada tanggal 21 Agustus 2015 dimana aktor non-negara diduga menggunakan senjata kimia di kota Marea, dekat dengan Aleppo. FFM mengumpulkan sampel dan mewawancarai dua individu yang terkena paparan, dan mengobati staf medis. Dalam hal ini, tim mampu mengkonfirmasi dengan sangat percaya diri bahwa setidaknya dua orang terkena mustard sulfur dan sedang dalam proses pemulihan dari paparan. Hal ini sangat mungkin bahwa efek mustard belerang mengakibatkan kematian bayi. Dewan Eksekutif OPCW dan Dewan Keamanan PBB telah menyatakan dukungan untuk pekerjaan FFM, dan telah menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memperpanjang kerja sama penuh kedua lembaga ini untuk misi dan memastikan bahwa bekerja dengan aman dan efektif.³²

Keterlibatan OPCW dalam konsep *disarmament* baru-baru ini tetap memberikan hasil yang tidak berbeda dari

diakses pada 21 Juni 2016.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

sebelumnya dimana senjata kimia tetap digunakan dalam konflik Suriah walaupun pemerintah Suriah telah menyatakan negaranya bebas dari bahan-bahan senjata kimia.³³ Alasan yang membuat OPCW tidak mampu menanggulangi bebasnya senjata kimia di Suriah yaitu OPCW tidak berhak menentukan pelaku pemakai senjata kimia dan bahan-bahan kimia sangat mudah didapat di kalangan sipil untuk dijadikan senjata. OPCW sebagai organisasi internasional yang berawal perjanjian KSK mampu memasuki negara untuk memberikan keamanan terhadap warga dalam negara Suriah yang terancam oleh senjata kimia dengan membuat pemerintah Suriah menandatangani dan meratifikasi perjanjian KSK sebagai syarat dalam perlucutan senjata kimia. Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah terhadap warga negaranya sendiri mencerminkan adanya gangguan terhadap *human security* (keamanan manusia) oleh penggunaan senjata kimia.

OPCW menekankan pada pendekatan tradisional dalam proses negosiasi akan keinginan pemerintah Suriah untuk bergabung dengan organisasi ini. Keinginan pemerintah Suriah untuk bergabung dengan OPCW lebih dititikberatkan pada hasil diplomasi pemerintah Rusia dan Amerika Serikat dengan pemerintah Suriah dengan hasil kesepakatan yang dirahasiakan. Seharusnya OPCW sebagai organisasi

³³ John Borrie dan Vanessa Martin Randin, *Alternative Approaches in Multilateral Decision Making Disarmament as Humanitarian Action*, (UN:UNIDIR, 2005), hlm. 54-55.

besar berperan sebagai aktor dominan dalam proses negosiasi untuk melucuti senjata kimia pemerintah Suriah. OPCW seharusnya juga diberikan kewenangan untuk mencari pelaku pengguna senjata kimia bukan hanya memastikan penggunaan senjata kimia sesuai dengan konsep *disarmament* dengan pendekatan *dekonstruksionisme*. Pendekatan yang digunakan dalam perlucutan senjata kimia mayoritas pada indikator pendekatan “tradisional” sehingga belum efektif bila diterapkan pada konflik kontemporer.

OPCW juga memiliki kekurangan dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional karena tidak mampu melucuti senjata kimia yang dimiliki dan disalahgunakan oleh aktor *non-state*. Ketentuan di dalam OPCW hanya mengikat anggotanya yaitu pemerintahan negara di dunia. OPCW merupakan organisasi internasional yang terikat oleh kesepakatan negara maka dalam melaksanakan fungsinya, OPCW melakukan tugas terbatas dengan kedaulatan sebuah negara. Organisasi ini tidak mampu melakukan perlucutan senjata secara langsung tanpa persetujuan negara khususnya aktor yang tidak meratifikasi KSK.

OPCW sesuai dengan pasal-pasal KSK yang digunakannya dalam beroperasi dinilai sangat birokratis hal ini sesuai dengan setiap pasal dimana negara tetap sebagai entitas tertinggi dalam melakukan perlucutan senjata kimia. Seharusnya sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan pada bab pertama, OPCW

harus lebih cepat dalam menanggulangi penggunaan senjata kimia dengan menggunakan pendekatan kontemporer dalam *disarmament*. Pemerintah Suriah yang resmi bergabung dengan OPCW pada September 2013, menjalani proses perlucutan senjata berjalan lambat. Suriah baru menyatakan bebas senjata kimia pada Januari 2016, dan itupun ternyata masih ada penggunaan senjata kimia oleh aktor *non-state* dengan rentang waktu tahun 2014 di saat proses perlucutan senjata sedang berlangsung hingga Juli 2016 setelah perlucutan senjata tercapai. Maka dari itu, OPCW harus diberikan kewenangan lebih dengan bersifat independen dalam melaksanakan tugas perlucutan senjata kimia tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Sebagai organisasi yang memang mengurus senjata kimia, OPCW harus mampu menyatakan aktor dan penggunaan senjata kimia secara transparan yang dapat dibuktikan kebenarannya tanpa adanya intervensi kepentingan politik negara tertentu.

Dengan demikian, dengan berbagai kekurangan dan hambatan yang ditemukan oleh OPCW, peredaran, penggunaan, dan pengembangan senjata kimia di Suriah masih belum dapat dihentikan. Sesuai dengan konsep *disarmament*, upaya perlucutan senjata haruslah maksimal atau seminimal mungkin telah mencapai tahap pertama *reintegration*, yaitu proses pengembalian *ex-combatant* kepada masyarakat. Secara lebih singkat analisis kegagalan OPCW dapat dilihat pada skema berikut.

Tabel 1. Skema Analisis Tahapan dan Instrumen Agenda OPCW

TAHAPAN	PROSES	STATUS	HAMBATAN
DISARMAMENT	Disarmament for combatans	Unclear	Keanggotaan Suriah dalam OPCW tidak berdasarkan sukarela, namun berdasarkan hasil kesepakatan antara Amerika Serikat dan Suriah yang bersifat rahasia, sehingga OPCW masih mendapatkan hambatan dalam akses pemeriksaan.
	Disarmament for non combatans	Unclear	Masih terdapat agen-agen non pemerintah yang tidak terdeteksi oleh OPCW karena kewenangan OPCW terbatas hanya dalam penggunaan senjata oleh pemerintah.
	Collect and destruct weapons (abolish)	Unclear	Masih terdapat indikasi penggunaan senjata kimia walaupun dalam skala kecil, masih sulit terdeteksi karena harus melalui verifikasi pemeriksaan lab langsung di wilayah perang. Pemerintah suriah belum dapat memberikan jaminan bantuan perlindungan tim OPCW.
DEMOBILIZATION	Weapon status verification	Clear	Sudah terdapat analisis yang akurat mengenai jenis-jenis senjata yang digunakan.
	Armed group demobilization	Unclear	OPCW masih belum dapat membubarkan <i>non-state actors</i>
	Weapon development dismissal	Unclear	OPCW masih belum dapat mendeteksi kegiatan pengembangan senjata kimia yang dilakukan oleh <i>non-state actors</i>
REINTEGRATION	Reintegration ex-combatans to society	Unclear	OPCW masih belum dapat membubarkan <i>non-state actors</i>
	Support group and supervision	Unclear	OPCW masih belum dapat membubarkan <i>non-state actors</i>

Sumber: Geis, A., & Schlag, G, "The facts cannot be denied: legitimacy, war and the use of chemical weapons in Syria", *Global Discourse*, 2017, 7(2-3), 285-303. Diolah oleh penulis.

Dari ketiga tahapan tersebut, 80% proses perlucutan senjata di Suriah belum selesai. Dengan demikian proses tersebut tidak dapat dikatakan berhasil, atau dengan kata lain adalah gagal. Proses akan dapat dikatakan berhasil jika pada tahapan *Integration* OPCW dapat menanggulangi hambatan yang dihadapi. Dalam skema tersebut dapat terlihat bahwa masih terdapat banyak keterbatasan yang dihadapi oleh OPCW,

terutama dalam menghadapi aktor-aktor non negara. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh OPCW di Suriah. OPCW harus diberikan kewenangan lebih dan bersifat independen dalam melaksanakan tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dalam melucuti senjata kimia. Selain itu, OPCW juga harus selalu memperbaharui senyawa kimia yang tidak boleh beredar di lingkungan sipil dan memiliki

kewenangan untuk mengawasi peredaran senyawa kimia di berbagai belahan dunia khususnya pada zona wilayah yang sedang berkonflik.

Kesimpulan

Senjata kimia merupakan senjata yang sangat mengerikan. Senjata kimia atau *chemical weapon/warfare* (CW) merupakan salah satu dari *Weapon Mass Destruction* (WMD) atau senjata pemusnah massal yang paling brutal yang dibuat oleh manusia. Agen CW adalah bahan kimia sintesis yang sangat beracun yang dapat tersebar sebagai gas, cair atau udara (*aerosol*) atau sebagai agen teradsorpsi ke partikel menjadi bubuk. Agen-agen CW memiliki efek sangat mematikan atau melumpuhkan pada manusia. Penggunaan senjata kimia dipastikan terjadi pada konflik Suriah. Pada Agustus 2013 terjadi serangan senjata kimia di wilayah Damaskus. Serangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap warga negaranya sendiri tersebut menghasilkan 1.429 orang tewas dalam serangan senjata kimia, termasuk setidaknya 426 anak-anak.

Upaya *disarmament* (perlucutan senjata) dilakukan oleh berbagai pihak agar senjata kimia tersebut tidak digunakan oleh pemerintah Suriah. Pemerintah Suriah yang mengakui memiliki senjata kimia bersedia untuk dilucuti. Perlucutan senjata kimia Suriah ini dilakukan berdasarkan keinginan Rusia dan AS untuk melucuti senjata kimia Suriah melalui diskusi kedua negara

ini. Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem mengatakan bahwa rezim Assad menyambut diskusi terkait penyerahan senjata kimia Suriah dan bergabung dengan KSK (Konvensi Senjata Kimia) hingga akhirnya pemerintah Suriah sepakat menandatangani dan meratifikasi KSK, Dewan Eksekutif OPCW mengadopsi susunan waktu untuk penghancuran senjata kimia Suriah. Waktu bersamaan pula, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat memutuskan untuk mengadopsi sebuah resolusi yang mendukung susunan waktu OPCW untuk menghancurkan gudang senjata kimia Suriah. Resolusi Dewan Keamanan mengatakan bahwa lembaga tersebut akan memberlakukan langkah-langkah di bawah bab 7 dari Piagam PBB jika Suriah tidak mematuhi resolusi, dan memiliki serta menggunakan wewenangnya untuk mentransfer setiap bahan kimia.

OPCW menyatakan senjata kimia yang dideklarasikan oleh pemerintah Suriah telah 100% dihancurkan pada awal Januari 2016. Walaupun berhasil, terdapat penggunaan senjata kimia pada rentang waktu Mei 2014-Juli 2016 oleh aktor non-state khususnya oleh kelompok teroris yang diberitakan oleh berbagai media. Hal ini diperkuat oleh sumber resmi seperti dari laporan PBB dan Pemerintah Amerika Serikat serta OPCW yang termasuk tim independen *Fact Finding Mission* (FFM) OPCW dengan didukung tim gabungan *Joint Investigation Mechanism* (JIM) OPCW-UN tidak bisa menyebutkan pelaku penggunaan senjata kimia oleh aktor non-state walaupun dipastikan adanya

penggunaan senjata kimia oleh aktor non-state di Suriah. Kedua tim ini hanya memastikan adanya penggunaan senjata kimia di Suriah di saat perlucutan senjata kimia sedang dilakukan dan perlucutan senjata kimia sudah dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, berbagai upaya OPCW telah dilakukan agar mampu melakukan perlucutan senjata kimia milik aktor non-state, namun perlucutan senjata kimia pemerintah Suriah tidak dilakukan bersamaan dengan perlucutan senjata kimia yang digunakan oleh aktor non-state. Keterlibatan OPCW sebagai organisasi internasional dalam melucuti senjata kimia oleh teroris ISIS dan kelompok oposisi yang tidak diakui pemerintah Suriah memiliki keterbatasan dalam beroperasi. Maka dari itu, OPCW sebagai organisasi internasional yang berlandaskan pada KSK dalam perlucutan senjata kimia dunia membutuhkan kewenangan lebih besar dan keluwesan dalam beroperasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Brewer, Cecily *Disarmament in South Sudan*. 2010. Washington: Center for Complex Operation.
- Borrie, John dan Vanessa Martin Randin. 2005. *Alternative Approaches in Multilateral Decision Making Disarmament as Humanitarian Action*. UN:UNIDIR.
- Ghosh, Peu. 2013. *International Relations*. Delhi : PHI Learning Private Limited.
- Sweijts, Tim dan Jaakko Kooroshy. 2010. *The Future of CBRN*. Hague: The Hague Centre for Strategic Studies.
- Takur, Ramesh dan Ere Haru. 2006. *The Chemical Weapons Convention: Implementation, Challenges and Opportunities*. Hongkong: United Nations University Press.
- Ushie, Henry Ekpe. *Disarmament In Third World Countries: Nigeria In Perspective*. Abuja: Department of Political Science and International Relations University of Abuja.

Jurnal

- Diab, M. Zuhair. 1997. "Syria's Chemical and Biological Weapons: Assessing Capabilities and Motivations". *The Nonproliferation Review* 5.
- Lele, Ajey. 2007. "CWC's First Decade". *Journal on Chemical and Biological Weapons*. Sep-Des.

Website

- "About OPCW-UN Joint Mission: Background", <http://opcw.unmissions.org/AboutOPCWUNJointMission/Background.aspx>.
- Bowman, Tom. U.S. "Hopes ISIS Prisoner Will Lead Americans To Chemical Weapons", 9 Maret 2016, <http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/03/09/469842162/u-s-hopes-isis-prisoner-will-lead-americans-to-chemical-weapons>.

- “Chemical Weapons Convention Signatories and States-Parties”, <https://www.armscontrol.org/factsheets/cwcsig>, Oktober 2015, diakses pada 20 Mei 2016.
- “Director-General circulates OPCW FFM Reports to States Parties”, 6 November 2015, <https://www.opcw.org/news/article/director-general-circulates-opcw-ffm-reports-to-states-parties/>, diakses pada 21 Juni 2016.
- “Government Assessment of the Syrian Government’s Use of Chemical Weapons on August 21 2013”, 30 Agustus 2013, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21>.
- Khatchadourian, Raffi, “The Case of Agent 15: Did Syria Use a Nerve Agent?”, 16 Januari 2013, <http://www.newyorker.com/news/news-desk/the-case-of-agent-15-did-syria-use-a-nerve-agent>.
- Kawashima, Yuta, *Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity 2012-2015*, <http://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity>, Mei 2015, diakses pada 15 Juni 2016.
- “Nobel Peace Prize 2013 received by OPCW Director-General: Working Together for a World Free of Chemical Weapons, and Beyond”, 10 Desember 2013, <https://www.opcw.org/news/article/nobel-peace-prize-2013-received-by-opcw-director-general-working-together-for-a-world-free-of-ch/>.
- “Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – Facts”, https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2013/opcw-facts.html, diakses pada 10 Juli 2016.
- “Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW”, <http://www.denhaag.nl/en/residents/to/Organisation-for-the-Prohibition-of-Chemical-Weapons-OPCW.htm>, 9 Mei 2014.
- Office of Press Secretary, “Statement by Deputy National Security Advisor for Strategic Communications Ben Rhodes on Syrian Chemical Weapons Use”, 13 Juni 2013, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statement-deputy-national-security-advisor-strategic-communications-ben->, diakses pada 29 Juni 2016.
- Office of Press Secretary, “Government Assessment of the Syrian Government’s Use of Chemical Weapons on August 21, 2013”, 30 Agustus 2013, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/08/30/government-assessment-syrian-government-s-use-chemical-weapons-august-21>.
- “Syria 2015/2016”, <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/>, diakses pada 29 Juni 2016.
- “The Chemical Weapons Ban Facts and Figures”, <https://www.opcw.org/news-publications/publications/facts-and-figures/>, diakses pada 2 Juni 2016.
- “Use of chemical weapons in Syria would be ‘reprehensible’ – UN chief”, 23 Juli 2012, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42538#.V3LqFV4TagU>.
- UN Human Rights Council, 23rd session, “Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic”, advance unedited version, UN document A/HRC/23/58, 4 Juni 2013.
- “UN’s Del Ponte says evidence Syria rebels ‘used sarin’, 6 Mei 2013, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22424188>, diakses pada 17 Juni 2016.
- “What is DDR?”, http://www.unddr.org/what-is-ddr/introduction_1.aspx.